Pendekatan Yurisdiski Berkelanjutan

Apa itu?

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan adalah inisiatif nasional untuk menunjukkan dan melacak keberlanjutan kabupaten dan komoditas seperti kelapa sawit, menggunakan seperangkat Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB). Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemajuan keberlanjutan di kabupaten ke pasar global, menginformasikan kebijakan domestik dan mekanisme insentif, serta menarik investasi hijau.

Komite Penasihat

Komite Penasehat Multipihak Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) – yang diketuai bersama oleh Bappenas dan Uni Eropa – terdiri dari perwakilan dari Pemerintah di tingkat Pusat dan Kabupaten, masyarakat sipil, serta industri. Komite tersebut memberikan masukan untuk implementasi inisiatif IYB, termasuk desain indikator, pengumpulan data, dan penyebaran data.

Platform Data

Platform data IYB memfasilitasi analisis dan bagipakai data terkait masing-masing dari 23 indikator (lihat table 1). Platform ini bertujuan memberi bahan bagi perencana dan pembuat kebijakan serta memberi perusahaan informasi dalam uji tuntas dan membuat keputusan yang berkelanjutan.

Integrasi Nasional

Platform data ini sedang dimasukkan ke dalam proses perencanaan pemerintah pusat untuk memandu alokasi pendanaan dalam mendukung keberlanjutan kabupaten, memantau implementasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), dan menginformasikan kebijakan terkait kelapa sawit.

Terpercaya dan KAMI

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dimulai pada tahun 2018 sebagai Inisiatif Terpercaya, dan sekarang didukung oleh projek KAMI (Keberlanjutan Sawit Malaysia dan Indonesia), keduanya didanai oleh UE. KAMI mendukung pengembangan indikator keberlanjutan lebih lanjut yang bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan dalam konteks undang-undang global yang baru.

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan

Melalui Terpercaya, 23 indikator telah diidentifikasi untuk mengukur produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten. Indikator tersebut dibangun berdasarkan kerangka hukum Indonesia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta melengkapi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Lingkungan

1. Perlindungan untuk Hutan Tetap
2. Perlindungan untuk Area yang Penting untuk Layanan Ekologi
3. Pencegahan Kebakaran
4. Perlindungan untuk Lahan Gambut
5. Mitigasi Perubahan Iklim
6. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
7. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Sosial

8. Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (FPIC) yang terintegrasi dalam Proses Pengajuan Izin Perkebunan
9. Pengakuan terhadap Tanah Adat
10. Resolusi Konflik
11. Prosentase untuk Petani Kecil
12. Pendaftaran Petani Kecil
13. Ketahanan Pangan

Ekonomi

14. Produktivitas Petani Kecil
15. Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Kecil
16. Bantuan untuk Petani Kecil
17. Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan (Khususnya Minyak Kelapa Sawit)
18. Tingkat Kemiskinan

Tata kelola

19. Proporsi Anggaran Kabupaten yang Dialokasikan Untuk Keberlanjutan
20. Akses Informasi Publik
21. Partisipasi Multi-Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten
22. Mekanisme Pengaduan
23. Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan

Penyangkalan. Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi Uni Eropa.

KAMI EFI BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Funded by the European Union